

AKUNTABILITAS PENGANGKUTAN SAMPAH DI PASAR SENTRAL RAPPANG PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Jumriah¹⁾, Muhammad Ikbal²⁾, Muhammad Arisal Asad³⁾

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Selawesi Selatan, Indonesia

Email: 02jumriah@gmail.com, iqbal.sidrap@yahoo.com, arisalasad@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi bagaimana Akuntabilitas Pengangkutan Sampah di Pasar Sentral Rappang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang. Metode penelitian yang diterapkan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas Kepala Bidang Dinas Lingkungan Hidup, seorang petugas pengangkut sampah, serta pedagang pasar. Analisis data dilakukan dengan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menggunakan bantuan aplikasi Nvivo 12 Plus. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa akuntabilitas pengangkutan sampah masih belum tercapai secara maksimal. Faktor yang paling dominan adalah budaya organisasi dan masyarakat (25,93%), disusul sumber daya manusia (22,22%), sarana dan prasarana (14,81%), transparansi dan sistem informasi (11,11%), regulasi dan kebijakan (11,11%), kepemimpinan (7,41%), dan anggaran (7,41%). Perbedaan sudut pandang informan menunjukkan bahwa penekanan terhadap indikator akuntabilitas bergantung pada posisi dan fungsi masing-masing. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyarankan agar Dinas Lingkungan Hidup meningkatkan kapasitas personel dan armada, memperkuat sistem informasi digital, mengintensifkan sosialisasi regulasi, menyediakan pelatihan bagi petugas, serta memberikan pendidikan kepada masyarakat pasar guna mendukung terciptanya pengelolaan sampah yang lebih akuntabel dan berkesinambungan.

Kata Kunci: Akuntabilitas; Pengangkutan Sampah; Dinas Lingkungan Hidup; Pasar Sentral Rappang.

ABSTRACT

This study aims to explore the accountability of waste transportation at Rappang Central Market under the Environmental Agency of Sidenreng Rappang Regency. The research employed a descriptive qualitative method, with data collected through in-depth interviews, field observations, and documentation. The informants consisted of the Head of Division at the Environmental Agency, a waste transportation officer, and a market vendor. Data analysis was carried out using an interactive model that included data reduction, data presentation, and conclusion drawing, supported by the Nvivo 12 Plus application. The findings show that the accountability of waste transportation has not yet been fully achieved. The most dominant influencing factor was organizational and community culture (25.93%), followed by human resources (22.22%), facilities and infrastructure (14.81%), transparency and information systems (11.11%), regulations and policies (11.11%), leadership (7.41%), and budget (7.41%). Differences in the perspectives of the informants indicate that the emphasis on accountability indicators depends on their respective positions and functions. Based on these findings, the study recommends that the Environmental Agency increase the capacity of personnel and transportation fleets, strengthen digital information systems, intensify regulatory outreach, provide training for officers, and deliver education programs for market communities to support more accountable, clean, and sustainable waste management at Rappang Central Market.

Keywords: Accountability; Waste Transportation; Environmental Agency; Rappang Central Market.

PENDAHULUAN

Akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban individu maupun organisasi untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pihak yang berhak memperoleh penjelasan mengenai aktivitas atau kinerja yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks Dinas Lingkungan Hidup, akuntabilitas berarti kewajiban instansi ini untuk menyampaikan informasi yang jelas, mempertanggungjawabkan tindakan, serta melaporkan penggunaan sumber daya dalam pengelolaan lingkungan hidup. Aspek akuntabilitas mencakup transparansi, keterbukaan, serta pelaksanaan tugas yang sesuai dengan ketentuan hukum kepada masyarakat, pemerintah, maupun lembaga pengawas.

Dalam administrasi publik, akuntabilitas selalu menjadi isu menarik untuk dikaji, mengingat esensi dari praktik administrasi pemerintahan sangat erat kaitannya dengan persoalan akuntabilitas. Kondisi ini juga tampak di berbagai negara lain, di mana akuntabilitas telah lama menjadi perhatian utama, terutama dalam konteks perumusan kebijakan publik. (Arrias et al., 2019).

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memegang peranan penting dalam pengelolaan sampah, yang mencakup proses pengangkutan hingga pembuangan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Meski demikian, pelaksanaan tugas ini sering kali menghadapi hambatan, antara lain keterbatasan fasilitas, kekurangan tenaga kerja, serta minimnya keterlibatan masyarakat.

Peningkatan volume sampah menuntut adanya sistem pengelolaan yang lebih efektif, khususnya dalam aspek pengangkutan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2024 sebagai perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah. Pada Bab V Bagian Ketiga Paragraf 4, pasal 25 dan 26, ditegaskan ketentuan mengenai mekanisme pengangkutan. Beberapa aspek penting yang harus diperhatikan antara lain penentuan rute, metode pengangkutan, serta ketersediaan sarana prasarana. Desain rute yang lebih singkat akan mempercepat proses, mengurangi keterlambatan, serta menghemat penggunaan bahan bakar. Berdasarkan hasil observasi, ketidakefektifan pengangkutan mengakibatkan penumpukan sampah di TPS maupun kontainer, yang pada gilirannya menurunkan

kualitas serta estetika lingkungan, sekaligus memicu berbagai masalah kesehatan, seperti iritasi kulit dan gangguan pernapasan bagi masyarakat sekitar.

Pengangkutan sampah di Pasar Sentral Rappang masih menghadapi berbagai kendala. Di antaranya adalah keterbatasan fasilitas pendukung, kurang optimalnya koordinasi antara DLH dengan pedagang maupun pengunjung pasar, serta minimnya jumlah armada dan tenaga pengangkut. Kondisi tersebut kerap menyebabkan terjadinya penumpukan sampah di sekitar area pasar, yang pada akhirnya menurunkan citra kebersihan dan kenyamanan pasar.

Permasalahan sampah merupakan isu yang membutuhkan perhatian mendalam karena praktik pembuangan yang ada belum sejalan dengan prinsip serta teknologi pengelolaan yang ramah lingkungan. Kondisi ini dapat memicu dampak negatif dan menghambat terwujudnya masyarakat yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, pengelolaan sampah yang bersifat terpadu sangat diperlukan, tidak hanya untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan hidup, tetapi juga untuk membentuk perilaku masyarakat yang lebih bertanggung jawab, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. (Setia Nugraha et al., 2021).

Pasar Sentral Rappang, yang merupakan salah satu pasar utama di Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, menghadapi tantangan serius terkait pengelolaan sampah. Aktivitas harian di pasar ini menghasilkan beragam jenis sampah, mulai dari organik hingga plastik, yang sebagian besar tidak tertangani dengan baik. Sistem pengangkutan yang kurang efisien mengakibatkan berbagai dampak negatif, antara lain pencemaran lingkungan, risiko kesehatan, serta penurunan kenyamanan bagi pedagang dan pengunjung pasar.

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana permasalahan dalam proses pengangkutan sampah di Pasar Sentral Rappang serta merumuskan solusi yang tepat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menilai tingkat akuntabilitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan pengangkutan sampah di pasar tersebut.

METODE PENELITIAN

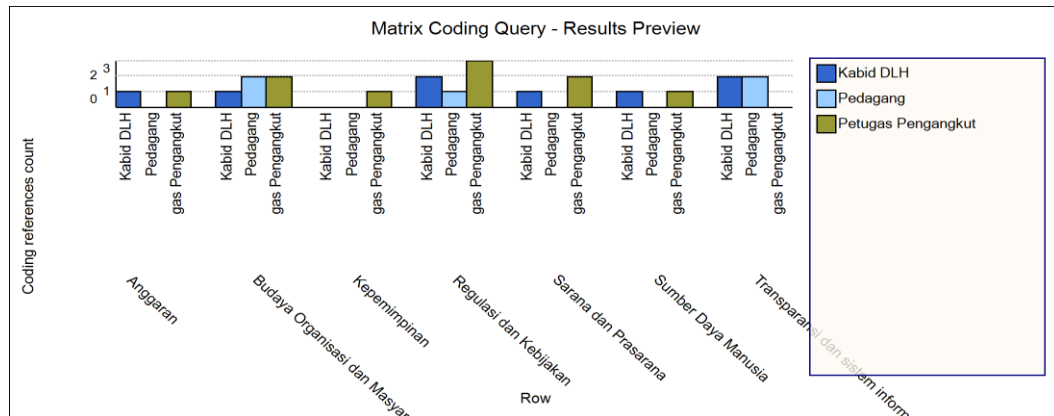
Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan pertimbangan bahwa pasar tersebut merupakan salah satu pusat aktivitas perdagangan terbesar di wilayah setempat. Tingginya intensitas transaksi ekonomi yang berlangsung setiap hari berdampak pada besarnya timbulan sampah, sehingga lokasi ini dinilai representatif untuk mengkaji akuntabilitas pengangkutan sampah sebagai bagian dari pelayanan publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam dan komprehensif terhadap fenomena yang diteliti berdasarkan kondisi empiris di lapangan. Penentuan informan dilakukan melalui teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan tingkat keterlibatan dan relevansi informan terhadap fokus penelitian. Informan terdiri atas tiga kategori utama, yaitu pejabat struktural Dinas Lingkungan Hidup yang merepresentasikan aspek kebijakan, petugas pengangkut sampah sebagai pelaksana teknis di lapangan, serta pedagang pasar sebagai pihak yang merasakan langsung dampak dari pelayanan pengangkutan sampah. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi langsung terhadap proses pengangkutan sampah, serta studi dokumentasi yang mencakup regulasi dan laporan kegiatan terkait. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk meningkatkan ketelitian dan sistematika analisis, penelitian ini didukung oleh penggunaan perangkat lunak NVivo 12 Plus dalam proses pengodean, pengelompokan tema, serta visualisasi hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas Pengangkutan Sampah di Pasar Sentral Rappang

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh tentang akuntabilitas pengangkutan sampah di Pasar Sentral Rappang, peneliti memanfaatkan NVivo 12 Plus pada tahap analisis data. Data wawancara dari tiga informan kunci, yakni Kepala Bidang DLH, petugas pengangkut sampah, dan pedagang pasar, dikodekan secara sistematis. Proses ini memungkinkan peneliti menelusuri tema dan faktor yang paling sering muncul dalam pernyataan informan.

Selanjutnya, temuan dianalisis dan ditampilkan melalui *Matrix Coding Query*. Visualisasi tersebut memperlihatkan hubungan antara kategori akuntabilitas, meliputi SDM, sarana prasarana, kepemimpinan, anggaran, regulasi kebijakan, budaya organisasi dan masyarakat, serta transparansi, dengan sudut pandang masing masing informan secara komparatif dan kontekstual berbasis data kualitatif.



Gambar 1. Visualisasi Diagram Informan (Sumber : Nvivo 12 Plus)

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat, dapat dinyatakan bahwa akuntabilitas pengangkutan sampah di Pasar Sentral Rappang belum berjalan secara optimal. Kondisi ini ditandai dengan masih seringnya terjadi penumpukan sampah di area pasar yang berdampak pada kebersihan, kenyamanan, dan aktivitas ekonomi. Keterbatasan armada pengangkut menjadi salah satu faktor utama yang menghambat kelancaran pengelolaan sampah, karena hanya tersedia satu kendaraan khusus untuk melayani kebutuhan pasar dan kendaraan tersebut kerap mengalami kendala teknis. Selain masalah sarana, aspek sumber daya manusia juga menjadi tantangan, di mana jumlah petugas pengangkut sampah yang terbatas tidak sebanding dengan volume sampah yang dihasilkan setiap hari. Meskipun petugas telah mendapatkan pelatihan teknis, kondisi di lapangan menunjukkan beban kerja yang tinggi sehingga pengangkutan tidak dapat dilakukan secara rutin dan tepat waktu.

Akibatnya, sampah sering dibiarkan menumpuk selama beberapa hari, terutama sampah basah yang menimbulkan bau tidak sedap dan mengganggu lingkungan sekitar. Situasi ini turut dirasakan oleh para pedagang, yang menilai bahwa keterlambatan pengangkutan sampah berdampak negatif terhadap

kenyamanan pembeli dan menurunkan minat masyarakat untuk berkunjung ke pasar. Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa permasalahan pengangkutan sampah di pasar tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan fasilitas dan tenaga kerja, tetapi juga mencerminkan perlunya peningkatan koordinasi, dukungan sarana prasarana, serta kesadaran bersama agar pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil analisis *Matriks Coding Query* menggunakan perangkat lunak NVivo 12 Plus, yang di peroleh dari hasil wawancara ketiga informan Kabid DLH, Petugas Pengangkut, dan Pedagang Pasar yang menjadi faktor yang paling dominan yang mempengaruhi akuntabilitas yaitu Budaya Organisasi dan Masyarakat dengan persentase sebesar 25,93%, diikuti oleh faktor Sumber Daya Manusia sebesar 22,22%, selanjutnya faktor Sarana dan Prasarana sebesar 14,81%, kemudian faktor Transparansi dan Sistem Informasi sebesar 11,11%, faktor Regulasi dan Kebijakan sebesar 11,11%, faktor Kepemimpinan sebesar 7,41%, dan faktor yang terakhir adalah Anggaran sebesar 7,41%. Temuan ini menekankan bahwa upaya peningkatan Akuntabilitas Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengangkutan Sampah di Pasar Sentral Rappang tidak hanya bergantung pada satu aspek saja, akan tetapi perlu pendekatan yang komprehensif yang mencakup kesadaran masyarakat, optimalisasi sumber daya manusia, perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan transparansi informasi, penegakan aturan, serta pengelolaan anggaran dan kepemimpinan yang efektif.

Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengangkutan Sampah di Pasar Sentral Rappang

1. Budaya Organisasi dan Masyarakat

Faktor ini paling dominan, menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan pasar menjadi hambatan besar. Ketidakpedulian ini berpengaruh langsung pada efektivitas pengelolaan sampah dalam hal ini pengangkutan sampah, karena meskipun pengangkutan sudah dilakukan, sampah kembali menumpuk akibat perilaku masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran dan perilaku masyarakat menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas pengelolaan sampah, khususnya pada aspek pengangkutan. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa meskipun upaya pembersihan dan pengangkutan sampah telah dilakukan secara rutin, penumpukan sampah kembali terjadi dalam waktu singkat akibat kebiasaan membuang sampah sembarangan. Situasi ini mencerminkan lemahnya tanggung jawab kolektif dalam menjaga kebersihan lingkungan, terutama di area publik yang memiliki aktivitas ekonomi tinggi. Kurangnya kepedulian tersebut menyebabkan sistem pengangkutan sampah tidak berjalan optimal karena volume sampah terus bertambah tanpa diimbangi perubahan perilaku masyarakat. Hal ini juga menandakan bahwa perbaikan teknis semata, seperti peningkatan frekuensi pengangkutan, belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan sampah secara berkelanjutan. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dengan menitikberatkan pada perubahan perilaku melalui pendidikan lingkungan yang berkelanjutan agar masyarakat memahami dampak buruk sampah terhadap kesehatan dan kenyamanan lingkungan. Selain itu, komunikasi yang melibatkan komunitas setempat perlu diperkuat untuk menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Penerapan sanksi yang tegas dan konsisten juga menjadi langkah penting sebagai efek jera bagi pelanggaran, sehingga dapat mendorong kepatuhan terhadap aturan kebersihan. Integrasi antara sistem pengangkutan sampah yang efektif dan peningkatan kesadaran masyarakat menjadi kunci keberhasilan pengelolaan sampah secara menyeluruh.

Faktor paling dominan dalam penelitian ini adalah budaya organisasi dan budaya masyarakat yang belum mendukung pengelolaan kebersihan pasar secara berkelanjutan. Kesadaran pedagang pasar masih tergolong rendah dalam menjaga kebersihan lingkungan usaha mereka. Banyak pedagang membuang sampah sembarangan dan cenderung bergantung sepenuhnya pada petugas kebersihan. Kondisi ini menunjukkan lemahnya rasa tanggung jawab bersama. Padahal, menurut konsep akuntabilitas publik, masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung kinerja pemerintah, sebagaimana ditegaskan oleh Rahmawati dan Purwanto (2020). Rendahnya partisipasi pedagang menandakan bahwa

akuntabilitas belum menjadi kesadaran kolektif. Oleh karena itu, pemerintah daerah tidak hanya dituntut menyediakan sarana, tetapi juga melakukan sosialisasi dan pendidikan lingkungan secara berkelanjutan.

2. Sumber Daya Manusia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah tenaga kerja kebersihan menjadi hambatan teknis utama dalam pengelolaan sampah di Pasar Sentral Rappang. Jumlah personel yang tersedia tidak sebanding dengan volume sampah harian yang terus meningkat, sehingga berdampak langsung pada efektivitas dan ketepatan waktu pelayanan. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan armada pendukung, yang menyebabkan proses pengangkutan sampah tidak dapat dilakukan secara optimal. Akibatnya, petugas harus menanggung beban kerja yang berlebihan, memicu kelelahan kerja, menurunkan produktivitas, serta berpotensi menurunkan kualitas layanan yang dirasakan masyarakat. Dalam konteks akuntabilitas layanan publik, situasi tersebut menunjukkan perlunya langkah strategis berupa penambahan jumlah personel kebersihan yang memadai agar beban kerja dapat terdistribusi secara lebih proporsional. Selain aspek kuantitas, peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan teknis juga dipandang sebagai prasyarat penting untuk memperbaiki kinerja layanan. Investasi pada pengembangan kompetensi diharapkan mampu meningkatkan keterampilan operasional, efisiensi kerja, dan pemahaman terhadap standar pelayanan. Secara keseluruhan, pemenuhan kebutuhan tenaga kerja dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia akan memberikan dampak ganda, yakni meningkatkan kualitas dan responsivitas layanan kebersihan sekaligus memperbaiki kepuasan masyarakat serta moral kerja petugas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan empiris yang menunjukkan bahwa keterbatasan tenaga kebersihan dan sarana pendukung merupakan faktor krusial rendahnya kinerja layanan persampahan di pasar tradisional. Penelitian oleh Rahman (2022) menegaskan bahwa ketimpangan antara volume sampah dan jumlah petugas menyebabkan keterlambatan pengangkutan serta penurunan kualitas layanan. Sementara itu, studi Sari (2022) menunjukkan bahwa penambahan personel yang disertai pelatihan teknis berpengaruh signifikan terhadap efisiensi

kerja dan kepuasan masyarakat. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan SDM dan penguatan kapasitas petugas menjadi strategi penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas layanan kebersihan.

3. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana pengangkut sampah yang secara khusus melayani Pasar Sentral Rappang masih tergolong kurang memadai. Informan menyatakan bahwa jumlah kendaraan operasional yang dialokasikan untuk pasar tersebut belum mampu mengimbangi volume sampah yang dihasilkan setiap hari. Kondisi ini berdampak langsung pada efektivitas dan efisiensi proses pengangkutan sampah, terutama pada waktu-waktu tertentu ketika terjadi peningkatan volume sampah secara signifikan. Keterbatasan armada menyebabkan terjadinya penumpukan sampah di area pasar serta menambah beban kerja petugas lapangan, yang harus menyesuaikan jadwal pengangkutan dengan kapasitas kendaraan yang tersedia. Temuan ini menunjukkan adanya kendala sarana prasarana dalam pengelolaan sampah pasar.

Ketersediaan armada pengangkut sampah sangat menentukan kelancaran pelayanan di Pasar Sentral Rappang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah kendaraan khusus masih terbatas dan kerap mengalami kerusakan teknis, sehingga pengangkutan tidak berlangsung rutin maupun tepat waktu. Mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 3 Tahun 2013 serta pandangan Vinet & Zhedanov (2011), pengangkutan sampah harus memperhatikan kapasitas kendaraan, efisiensi rute, dan frekuensi layanan yang memadai. Namun, kondisi lapangan memperlihatkan ketiga aspek tersebut belum terpenuhi secara optimal. Temuan ini sejalan dengan penelitian Arrias et al. (2019) yang menegaskan keterbatasan armada dan sarana teknis menurunkan akuntabilitas pengelolaan sampah, sehingga peremajaan armada dan penambahan fasilitas kebutuhan.

4. Transparansi dan Sistem Informasi

Faktor transparansi dan sistem informasi memegang peranan penting dalam pengelolaan pengangkutan sampah di Pasar Sentral Rappang. Ketidakjelasan dan kurangnya keterbukaan informasi mengenai jadwal pengangkutan sampah menjadi sumber utama keluhan pedagang. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan

komunikasi antara petugas kebersihan dan masyarakat pengguna layanan. Ketika informasi jadwal tidak disampaikan secara teratur dan mudah diakses, pedagang kesulitan menyesuaikan waktu pembuangan sampah, sehingga sampah kerap menumpuk dan berdampak pada menurunnya kebersihan lingkungan pasar. Situasi tersebut tidak hanya memicu ketidakpuasan, tetapi juga berpotensi memperburuk kondisi kesehatan dan kenyamanan aktivitas ekonomi di pasar. Oleh karena itu, penyediaan informasi yang jelas, konsisten, dan transparan terkait jadwal serta prosedur pengangkutan sampah menjadi kebutuhan mendesak. Pemanfaatan sistem informasi yang sederhana dan mudah dijangkau, seperti papan pengumuman, media sosial resmi, atau aplikasi digital, dinilai dapat meningkatkan efektivitas komunikasi antara petugas kebersihan dan pedagang. Dengan adanya sistem informasi yang baik, akuntabilitas layanan dapat ditingkatkan, kepercayaan masyarakat dapat terbangun, serta tercipta hubungan kerja yang lebih harmonis antara masyarakat dan pengelola kebersihan pasar.

Transparansi merupakan indikator utama dalam mewujudkan akuntabilitas publik, khususnya pada pelayanan pengelolaan sampah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi terkait jadwal pengangkutan sampah belum tersosialisasi secara efektif kepada pedagang pasar. Kondisi ini menyebabkan pedagang sering tidak mengetahui waktu pengangkutan, sehingga muncul keluhan ketika sampah menumpuk dalam waktu lama dan mengganggu aktivitas usaha. Menurut Sawir (2022), transparansi pelayanan publik menuntut penyampaian informasi yang cepat, tepat, dan terbuka kepada masyarakat. Oleh karena itu, minimnya transparansi dari DLH mencerminkan lemahnya akuntabilitas horizontal, yakni pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat sebagai pengguna layanan publik secara berkelanjutan demi peningkatan kualitas layanan dan kepercayaan publik yang lebih baik bersama.

5. Regulasi dan Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup masih berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang bersifat umum dan belum disesuaikan dengan karakteristik lokasi pelayanan, khususnya pasar. Praktik di lapangan menggambarkan bahwa sampah yang telah

dikumpulkan langsung diangkut dan dibuang tanpa adanya tahapan teknis yang lebih rinci. Kondisi ini mengindikasikan belum adanya regulasi operasional yang spesifik sebagai pedoman kerja yang seragam bagi petugas. Akibatnya, pelaksanaan tugas sangat bergantung pada interpretasi masing-masing petugas, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan cara kerja dan ketidakkonsistenan kualitas layanan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi dan SOP yang lebih jelas, rinci, serta kontekstual agar dapat menjadi dasar yang kuat dalam pelaksanaan kegiatan pengangkutan sampah. Selain itu, sosialisasi regulasi secara berkelanjutan dan evaluasi rutin perlu dilakukan agar kebijakan yang ditetapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar dipahami dan diterapkan secara optimal di lapangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2024 telah mengatur secara rinci mekanisme pengangkutan sampah, mulai dari pengumpulan hingga pembuangan akhir. Namun demikian, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala sehingga belum berjalan optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah dirumuskan dan praktik nyata di lapangan. Menurut Rasul (2000), akuntabilitas birokrasi tidak hanya diukur dari keberadaan regulasi, tetapi juga dari konsistensi dan kualitas pelaksanaannya. Oleh karena itu, meskipun DLH memiliki dasar hukum yang kuat, lemahnya pengawasan, keterbatasan sarana prasarana, serta kapasitas sumber daya manusia menyebabkan kebijakan pengangkutan sampah belum sepenuhnya efektif dan berkelanjutan.

6. Anggaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam pengelolaan sampah di Pasar Sentral Rappang. Anggaran yang terbatas berdampak langsung pada berbagai aspek operasional, seperti rekrutmen sumber daya manusia, peremajaan dan penambahan armada pengangkut sampah, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung. Kondisi ini memaksa pengelola untuk melakukan pengaturan dan penyesuaian secara maksimal agar layanan tetap berjalan meskipun dengan fasilitas yang tidak memadai. Akibatnya, kapasitas kerja petugas lapangan menjadi terbatas, proses pengangkutan sampah

sering mengalami keterlambatan, dan potensi penumpukan sampah di area pasar meningkat. Situasi tersebut berisiko menurunkan kualitas kebersihan dan pelayanan pasar secara keseluruhan. Dengan demikian, ketersediaan anggaran yang memadai sangat menentukan efektivitas pengelolaan sampah, karena berperan penting dalam menjamin kelancaran operasional, peningkatan kualitas layanan, serta terciptanya lingkungan pasar yang bersih dan sehat.

Keterbatasan anggaran merupakan faktor krusial yang sangat memengaruhi kualitas pelayanan pengangkutan sampah oleh DLH. Temuan penelitian menunjukkan bahwa alokasi dana yang tersedia belum memadai untuk penambahan armada, perbaikan kendaraan operasional, serta peningkatan kesejahteraan petugas lapangan. Kondisi ini berdampak langsung pada terhambatnya kinerja DLH dalam melaksanakan pengangkutan sampah secara optimal dan berkelanjutan. Fenomena tersebut sejalan dengan penelitian Cahyani et al (2021) di Kabupaten Gowa yang menegaskan bahwa peningkatan upah dan pemberian jaminan kesehatan bagi petugas pengangkut sampah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas DLH, sehingga dukungan anggaran yang memadai menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya akuntabilitas pengelolaan sampah daerah secara konsisten berorientasi pada pelayanan publik.

7. Kepemimpinan

Kepemimpinan memiliki peran kunci dalam menjamin kinerja petugas lapangan pengelolaan sampah agar berjalan efektif dan akuntabel. Petugas merasakan adanya keterlibatan pimpinan melalui pelatihan, pemberian arahan, serta evaluasi kinerja yang dilakukan secara rutin. Praktik kepemimpinan tersebut tidak hanya berorientasi pada pengawasan administratif, tetapi juga pada pembinaan, motivasi, dan pendampingan langsung di lapangan. Kepemimpinan yang konsisten mendorong peningkatan disiplin kerja, tanggung jawab, serta pemahaman petugas terhadap tugas dan standar pelayanan. Selain itu, pimpinan yang aktif berperan dalam pengembangan kompetensi petugas sehingga tercipta budaya kerja yang produktif dan kolaboratif. Dampaknya terlihat pada meningkatnya kualitas pelayanan pengelolaan sampah serta dukungan terhadap upaya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan secara berkelanjutan melalui koordinasi internal yang

baik serta komunikasi berkesinambungan antara pimpinan dan petugas lapangan operasional.

Kepemimpinan yang efektif berperan strategis dalam meningkatkan kinerja dan akuntabilitas petugas lapangan pengelolaan sampah melalui arahan, pembinaan, serta evaluasi berkelanjutan. Keterlibatan pimpinan secara langsung mendorong disiplin, tanggung jawab, dan pemahaman standar kerja, sekaligus membangun motivasi dan budaya kolaboratif. Hal ini sejalan dengan temuan Sutrisno dkk. (2022) yang menyimpulkan bahwa kepemimpinan partisipatif berpengaruh signifikan terhadap kinerja petugas layanan publik. Selain itu, penelitian Rahmawati (2022) menunjukkan bahwa kepemimpinan yang konsisten dan komunikatif meningkatkan kualitas pelayanan persampahan serta keberlanjutan kebersihan dan kesehatan lingkungan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini bahwa akuntabilitas pengangkutan sampah di Pasar Sentral Rappang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang belum berjalan secara optimal. Keterbatasan sumber daya manusia menyebabkan tidak semua titik pengangkutan dapat terlayani setiap hari, sementara sarana dan prasarana yang tersedia, khususnya kendaraan dan kontainer, masih belum memadai. Kondisi ini diperburuk dengan minimnya sistem informasi dan transparansi, baik bagi petugas maupun masyarakat, sehingga koordinasi dan pengawasan sulit dilakukan secara efektif. Dari sisi regulasi, pelaksanaan aturan dan kebijakan belum terlaksana maksimal karena kurangnya sosialisasi, sehingga masyarakat belum sepenuhnya memahami kewajiban mereka dalam menjaga kebersihan pasar. Rendahnya kesadaran masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan juga menjadi hambatan besar dalam mewujudkan tata kelola pengelolaan sampah yang akuntabel. Selain itu, kepemimpinan dan pengawasan belum optimal, terlihat dari lemahnya evaluasi kinerja serta tidak adanya insentif khusus bagi petugas. Faktor anggaran yang terbatas semakin memperburuk kondisi, karena berdampak pada keterlambatan layanan serta terbatasnya operasional di lapangan. Dengan demikian, akuntabilitas pengangkutan sampah masih

menghadapi berbagai tantangan struktural maupun kultural yang perlu segera dibenahi untuk meningkatkan kualitas layanan kebersihan di Pasar Sentral Rappang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arrias, A., Rasyid, R., & Hadi, K. (2019). Akuntabilitas pengelolaan sampah dalam pelayanan publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 115–126.
- Cahyani, N., Rahman, A., & Yusuf, M. (2021). Pengaruh kesejahteraan petugas terhadap akuntabilitas pengelolaan sampah daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(1), 45–56.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Rahman, A. (2022). Kinerja petugas kebersihan pasar tradisional dalam pengelolaan sampah. *Jurnal Pelayanan Publik*, 6(1), 22–31.
- Rahmawati, D. (2022). Kepemimpinan dan kualitas pelayanan persampahan daerah. *Jurnal Manajemen Publik*, 10(2), 134–145.
- Rahmawati, D., & Purwanto, E. A. (2020). Akuntabilitas publik dalam pelayanan pemerintahan daerah. *Jurnal Administrasi Negara*, 14(1), 1–12.
- Rasul, S. (2000). *Pengukuran kinerja birokrasi publik*. Jakarta: Penerbit LAN RI.
- Sari, M. (2022). Pengaruh pelatihan teknis terhadap kinerja petugas kebersihan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 5(2), 78–88.
- Sawir, M. (2022). Transparansi pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 60–71.
- Setia Nugraha, A., Hidayat, R., & Lestari, S. (2021). Pengelolaan sampah berkelanjutan berbasis masyarakat. *Jurnal Lingkungan Hidup*, 13(2), 95–105.
- Sutrisno, B., Handayani, S., & Pratama, R. (2022). Kepemimpinan partisipatif dan kinerja petugas layanan publik. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, 4(1), 23–34.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Vinet, L., & Zhedanov, A. (2011). A “missing” family of classical orthogonal polynomials. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 44(8), 085201. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>